

REFORMASI: POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI DI INDONESIA

Supandi

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: dr.supandi@uim.ac.id

Abstrak

Pangangan reformasi telah membawa banyak dampak dan perubahan dari sistem pendidikan yang sentralisasi ke desentralisasi yang masing-masing akan membawa konsekuensi yang jauh berubah di dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional. Secara umum ada beberapa hal dampak politik reformasi bagi pendidikan Islam, yang diantaranya adalah 1) Undang-undang No 20 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa Pesantren, Ma'had Ali, Roudlotul Atfal dan majlis taklim juga termasuk kedalam system pendidikan Nasional. 2) Lahirnya kebijakan peningkatan anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD, 3) Adanya kebijakan pemerintah yang menghendaki madrasah sebagaisekolah umum yang bercirikan ke-agamaan, 4) Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia ini dari masa Reformasi hingga sekarang menghadapi berbagai macam problem yang diantaranya adalah: 1) Penggunaan pemikiran Islam klasik, 2) Adanya krisis konseptual atau pembatasan ilmu di dalam system pendidikan Islam itu sendiri, 3) Krisis kelembagaan disebabkan karena adanya dikotomi antara lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmu agama ataukah ilmu-ilmu umum.

Kata kunci: Politik Islam dan Reformasi

Abstract

Pangangan reform has brought many impacts and changes from the education system that are centralized to decentralized, each of which will have far-reaching consequences in the administration of national education. In general, there are several aspects of the political impact of reform on Islamic education, including 1) Law No. 20/2003 also states that Islamic Boarding Schools, Ma'had Ali, Roudlotul Atfal and majlis taklim are also included in the National education system. 2) The birth of a policy of increasing the budget by 20% from the state budget and regional budget, 3) There is a government policy that requires madrasa as a public school characterized by religion, 4) The existence of Islamic education in Indonesia from the Reformation era until now faces various kinds of problems including : 1) The use of classical Islamic thought, 2) The existence of a conceptual crisis or the limitations of knowledge within the Islamic education system itself, 3) The institutional crisis is caused by a dichotomy between educational institutions that emphasizes one aspect of the existing sciences, whether religious sciences or general sciences.

Keywords: Islamic Politics and Reform

A. Pendahuluan

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat *reformatif* dan revolusioner, termasuk pada bentuk pelaksanaan pendidikan yang juga berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik (orde baru dan reformasi). Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.¹

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun

1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan.

Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-Agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²

Reformasi di dunia pendidikan banyak dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam pemberian dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ataupun BSM, Wajib Belajar 9 tahun, dan

¹UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 ayat 4.

²Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Cemerlang, 2005), hlm. 102.

peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebagainya. Dan semua itu juga berlaku bagi pendidikan Islam. Jadi pada masa ini tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, baik madrasah dan sekolah semua sama.

Dalam system pendidikan Islam, *reformis based culture* yang bertujuan untuk mencetak muslim modern merupakan sebuah istilah yang didalamnya tercakup lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh kelompok muslim reformis di Indonesia.³

Era reformasi yang telah terjadi pada beberapa waktu sebelumnya telah banyak sekali membawa dampak dan implikasi pada system pendidikan yang diterapkan di Indonesia ini, sehingga dalam penulisan makalah ini penulis bagi pada beberapa dekade era reformasi itu sendiri, diantaranya adalah:

1. Pada masa pemerintahan BJ Habibie,
2. Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid,
3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno putri,
4. Dan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang tahun 2013.

B. Pembahasan

1. Kondisi riil politik pendidikan masa reformasi dan dampaknya

Indonesia sejak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan Nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat.

³Arief Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 Pergumulan antara Modernitas dan Identitas*, (Jakarta: Kencana, 2012), 159.

Perubahan dari sistem pendidikan yang sentralisasi ke desentralisasi akan membawa konsekuensi yang jauh berubah di dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional. Selain itu, peningkatan mutu sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan bebas abad ke-21 juga perlu mendapatkan perhatian.⁴ Sistem Pendidikan Nasional Era Reformasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga telah diuraikan dalam indikator-indikator keberhasilan atau kegagalannya, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Azzumardi Azra bahwa madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya masih menghadapi tantangan dan peluang yang cukup besar, namun jika ditinjau dari sisi sosiologis umat Islam yang menemukan “*new attacment*” merupakan modal yang paling berharga bagi lembaga pendidikan Islam sehingga

menyebabkan timbulnya yang namanya madrasah favorit, madrasah unggulan hingga pesantren urban dan lain sebagainya, semua itu merefleksikan bahwa pendidikan Islam masih mendapatkan tempat yang kuat ditengah masyarakat Indonesia yang semakin modern.⁵

Secara umum ada beberapa hal dampak politik reformasi bagi pendidikan Islam, yang diantaranya adalah:

Pertama, dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa Pesantren, Ma’had Ali, Roudlotul Atfal dan majlis taklim juga termasuk kedalam system pendidikan Nasional.⁶ Sehingga hal tersebut berdampak kepada terhapus dan hilangnya kesan diskriminasi lembaga pendidikan Islam yang selama ini masih belum

⁵Azzumardi Azra, *Asal Usl Modernisasi Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 63-64.

⁶Perubahan undang-undang nomer 2 tahun 1989 menjadi undang-undang 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional yang terdapat kekurangan atau kelemahan UU no 2 tahun 1989, 1) yaitu system pendidikan Nasional yang bersifat sentralistik, 2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan Negara lain, 3) belum mengemban misi pendidikan untuk semua, 4) belum dapat mendukung lahirnya peserta didik yang berakhlak mulia, 5) belum memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan multicultural, 6) belum dilaksanakan secara professional.

⁴Kebutuhan ini ditampung dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pentingnya tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional.

mendapatkan porsi dan posisi yang sama sebagai sebuah institusi lembaga pendidikan.

Kedua, lahirnya kebijakan peningkatan anggaran sebesar 20% dari APBN sehingga berdampak positif terhadap pendidikan Islam, pasalnya, pendidikan Islam bisa terpenuhi dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, serta dari sisi kesejahteraan para guru dan dosen yang bernaung dibawah kementerian Agama, karena lembaga pendidikan yang berada dibawah kementerian pendidikan Agama itu sama haknya dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah kementerian pendidikan Nasional.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang menghendaki madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan ke-agamaan yang berimplikasi kepada madrasah menjadi lembaga pendidikan sekolah umum Plus, pasalnya, dalam system pendidikan madrasah bukan hanya pelajaran umum saja yang mereka dapatkan, melainkan juga pelajaran Agama mereka juga rasakan.

2. Orientasi pendidikan Islam masa reformasi(masa pemerintahan Bj Habibie dan KH. Abdurrahman Wahid)

Pendidikan adalah keindahan proses belajar mengajar dengan pendekatan manusianya (*man-centered*), dan bukan sekadar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihakn mesin ketangan, dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, pendidikan menjadikan manusia mampumenaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya dzikir, dan dayaciptanya.Dari sudut pandang masyarakat, pendidikan adalah proses sosialisasi, yakni memasyarakatkannilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan.

Sehingga pendidikan harus berorientasi masa depan,dan harus futuristik. Sementara itu, dari sudut pandang individu, pendidikan adalah prosesperkembangan, yakni perkembangan potensi yang dimiliki secara maksimal dan diwujudkan dalam bentuk yang konkrit, dalam arti perkembangan menciptakan sesuatu yang baru dan berguna

untuk kehidupan masa yang akan datang.

Pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri yang khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang pada ke-Agamaan. Dapat juga digambarkan bahwa pendidikan yang mampu membentuk “*manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggun dalam moral*”. Hal ini berarti menurut cita-citanya pendidikan Islam untuk memproyeksi diri untuk memproduksi “*insan kamil*”, yaitu manusia yang sempurna. Pendidikan Islam dijalankan atas roda cita Islam itu sendiri, yaitu menjadikan manusia yang sempurna sebagai *abdun dan kholifah*.

Prinsip utama pendidikan Islam adalah pengembangan berpikir bebas dan mandiri secara demokratis dengan memperhatikan kecenderungan peserta didik secara individual yang menyangkut aspek kecerdasan akal dan bakat yang dititikberatkan kepada prinsip pendidikan Islam yang demokratis.

Masa pemerintahan BJ Habiebie membawa telah memberikan implikasi kepada system pendidikan di Indonesia,

termasuk juga system pendidikan Islam yang ada, mereka diantaranya adalah:

- a. Masa pemerintahan BJ Habiebie ini, lebih tepat disebut dengan era pasca 21 Mei 1998, karena, masa ini masih bersifat melanjutkan dari system orde baru, sehingga belum begitu banyak yang mengalami perubahan dari system tersebut.
- b. System pendidikan masa ini dituntut untuk bisa membuat jaringan dengan para pengguna lulusan dan sekolah sebagai input pendidikan.
- c. Kurikulum yang diterapkan, pada masa ini penerapan kurikulum masih bersifat melanjutkan masa sebelumnya, yaitu dengan menerapkan kurikulum 1994
- d. Pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat perguruan tinggi mulai diterapkan, sehingga dampaknya adalah harga pendidikan yang mahal dan jauh dari jangkauan orang miskin.
- e. Kurikulum masih tetap bersifat penyempurna dari kurikulum 1994.

3. Dampak pendidikan Islam masa reformasi (Masa Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono).

Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia, orang selalutidak puas dengan hasil-hasil yang diperoleh oleh perguruan tinggi. Masyarakat selalu menuntutlebih dari apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, sehingga hal tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk selalu berbenah diri agar mereka menjadi terus yang lebih baik dari sebelumnya.

Reformasi pada masa pemerintahan Megawati Sukarno Putri juga telah membawa implikasi terhadap dunia pendidikan yang diterapkan di Indonesia, pasalnya pada masa ini upaya perbaikan pendidikan sudah mulai di laksanakan walaupun belum maksimal.

Implikasi terhadap pendidikan tersebut diantaranya adalah:

- a. System pendidikan yang menggunakan Manajemen berbasis sekolah (MBS).
- b. Pendidikan murah dan gratis sudah mulai di dengungkan,

walaupun pada kenyataanya masih bertentangan dengan kenyataan.

- c. Anggaran biaya pendidikan sebesar 20% sudah di rencanakan walaupun masih belum teralisasi secara maksimal, pasalnya masa ini masih berada pada taraf pemulihan dari krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia
- d. Dalam bidang kurikulum, kurikulum 1994 sudah dirubah menjadi kurikulum 2000-2002 yang kemudian menjadi KBK.
- e. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yodoyono, penerapan pendidikan murah dan gratis sudah direalisasikan, hal tersebut terbukti dari realisasi program pendidikan wajib belajar 9 tahun.
- f. Pemaksimalan anggaran sebesar 20% dari APBN sudah direalisasikan.
- g. Dalam bidang kurikulum, dari KBK menjadi KTSP dan Kurikulum 2013.

4. Problematika pendidikan Islam secara umum dari masa reformasi hingga sekarang

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia ini dari masa Reformasi hingga sekarang menghadapi

berbagai macam problem yang diantaranya adalah:

- a. Penggunaan pemikiran Islam klasik, yaitu pemikiran sebagai produk masyarakat ratusantahun yang lalu, yang jauh berbeda dari status sosial di mana pendidikan Islam harus berperan didalamnya. Akibatnya, setiap materi keislaman ditempatkan dalam susunan kurikulum yang kurangmemberi peluang pengembangan daya kritis dan kreatif dengan metode yang relevan dan banyakdikaji dalam pemikiran modern.
- b. Adanya krisiskonseptual atau pembatasan ilmu di dalam system pendidikan Islam itu sendiri, Krisiskonseptual yang dimaksud adalah pembagian ilmu-ilmu di dalam Islam, yaitu pemisahan ilmu-ilmu*profane* (ilmu-ilmu keduniaan) dengan ilmu-ilmu sakral (ilmu-ilmu agama).
- c. Krisis kelembagaan disebabkan karena adanya dikotomi antara lembaga-lembagapendidikan yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmuagama ataucak ilmu-ilmu umum.

- d. Pendidikan Islam krisis metodologi dan krisis paedagogik.
- e. Krisis Orientasi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam atau sistem pendidikan Islam padaumumnya lebih berorientasi ke masa silam daripada masa depan.
- f. Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menopang program pembangunan.
- g. Kekurangan dana sehingga pendidikan Islam diorientasikan kepada seluruh konsumenpendidikan Islam juga didikte oleh lembaga penentu lapangan kerja.
- h. Masih labilnya sistem pendidikan nasional.
- i. Perkembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat sehingga duniapendidikan semakin tidak berdaya berkompetensi dengan laju perubahan masyarakat danperkembangan kebudayaan.
- j. Apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang belum cukupmenggembirakan dan hambatan psikologis yang

- bermula dari ketidakberdayaan pendidikan Islam dalam memenuhi logika persaingan.
- k. Adanya pelapisan sosial yang didasarkan pada ukuran serba materialistik dan menyebabkan masyarakat berlomba menyerbu sekolah atau lembaga pendidikan favorit, dengan tidak mengindahkan lagi aspek ideologis yang tersembunyi di baliknya.
5. Alternatif pemikiran pendidikan Islam masa reformasi
- Penataan kembali sistem pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan dengan sekedar modifikasi atau tambal sulam system pendidikan Islam yang ada di Negeri ini, upaya tersebut memerlukan rekonstruksi, rekonseptualisasi, dan reorientasi, antara lain sebagai berikut:
- Dibutuhkan suatu konsep yang menjernihkan dari aspek tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri.
 - Reformulasi pendidikan, artinya merumuskan kembali ilmu-ilmu Islam. Persoalan ini tidak sederhana, bukan hanya persoalan konseptual, akan tetapi juga persoalan-persoalan yang kadang-kadang sarat dengan ideologis.
 - Pengembangan sikap penerimaan kultural yang sadar terhadap perubahan akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih berorientasi ke masa depan (future oriented), tidak hanya sekedar berorientasi ke masa belakang (past oriented).
 - Rekontruksi kelembagaan.
 - Perumusan kembali makna pendidikan.
 - Keharusan dilakukan pendekatan baru dalam proses kependidikan itu sendiri. Pendidikan harus dipahami sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dan berkeeseimbangan.
 - Penumbuhan semangat scientific inquiry (semangat penelitian ilmiah) dan semangat ingintahu pada anak didik.
- C. Kesimpulan**
- Ere reformasi telah membawa banyak dampak dan perubahan dari sistem pendidikan yang sentralisasi ke desentralisasi yang masing-masing akan membawa konsekuensi yang jauh berubah di dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional. Secara umum ada beberapa hal dampak politik reformasi

bagi pendidikan Islam, yang diantaranya adalah:

1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa Pesantren, Ma'had Ali, Roudlotul Atfal dan majlis taklim juga termasuk kedalam system pendidikan Nasional.
2. Lahirnya kebijakan peningkatan anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menghendaki madrasah sebagaisekolah umum yang bercirikan ke-agamaan
4. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia ini dari masa Reformasi hingga sekarang menghadapi berbagai macam problem yang diantaranya adalah:
5. Penggunaan pemikiran Islam klasik,
6. Adanya krisis konseptual atau pembatasan ilmu di dalam system pendidikan Islam itu sendiri,
7. Krisis kelembagaan disebabkan karena adanya dikotomi antara lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmu agama ataukah ilmu-ilmu umum.
8. Pendidikan Islam krisis metodologi dan krisis paedagogik.

9. Krisis Orientasi, Lembaga-lembaga pendidikan Islam atau sistem pendidikan Islam pada umumnya lebih berorientasi ke masa silam daripada masa depan.

10. Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menopang program pembangunan.

11. Kekurangan dana sehingga pendidikan Islam diorientasikan kepada seluruh konsumen pendidikan Islam juga didikte oleh lembaga penentu lapangan kerja.

12. Masih labilnya sistem pendidikan nasional.

13. Perkembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat sehingga dunia pendidikan semakin tidak berdaya berkompetensi dengan laju perubahan masyarakat dan perkembangan kebudayaan.

Daftar Pustaka

Ali daud, *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Cemerlang, 2005.

Arief Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 Pergumulan antara Modernitas dan Identitas*, Jakarta: Kencana, 2012.

Azzumardi Azra, *Asal Usul Modernisasi Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

Undang-undang 20 tahun 2003 tentang
system pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, serta
pentingnya tenaga guru dan dosen
sebagai ujung tombak dari reformasi
pendidikan nasional.

UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31
ayat 4.